



Pemerintah Daerah Belum Melaksanakan Secara Efektif

Rekomendasi dan Penyelesaian

Kerugian Negara

PONTIANAK-RK. BPK Perwakilan Kalbar mencatat, laporan Hasil Pemeriksaan dan laporan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), serta penyelesaian kerugian negara/daerah semester II tahun 2018, Selasa (18/12). Pada kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor BPK Kalbar itu menunjukkan kinerja atas pelaksanaan dalam bidang-bidang yang menjadi penilaian belum dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan ini dihadiri kepala pemerintah daerah, Ketua DPRD dan Inspektur se Kalbar. Laporan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Kalbar Joko Agus Setyono. Laporan yang diserahkan merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Kalbar selama Semester II tahun 2018 terhadap delapan entitas pemeriksaan.

Terdapat tujuh laporan yang diserahkan. Terdiri dari hasil pemeriksaan kinerja dan dua laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

"Satu laporan PDTT atas pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Kayong Utara telah diserahkan tanggal 31 Oktober 2018. Sementara atas pemantauan TLRHP dan kerugian daerah, hasilnya diserahkan terhadap 15 entitas," ujar Joko.

Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Untuk periode ini,

pemeriksaan kinerja mencakup atas bidang pelayanan perizinan. Yaitu pengelolaan layanan perizinan IMB dan SIUP pada Pemerintah Kota Pontianak. Kemudian bidang pengelolaan dana desa, yaitu pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa pada pemerintah Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu. Selanjutnya bidang kesehatan, yaitu pengelolaan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta dokter serta tenaga kesehatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten Mempawah.

Kemudian bidang pendidikan, yaitu pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan PIP (Program Indonesia Pintar) dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun pada Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten Sambas. "Dari hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan atas bidang-bidang tersebut belum dilaksanakan secara efektif," ungkap Joko.

Hal ini lantaran permasalahan dalam pengelolaan bidang perizinan. Seperti tata kelembagaan, regulasi, kebijakan dan perencanaan sumber daya manusia yang masih belum memadai.

"Untuk dana desa, permasalahan mencakup antara lain lemahnya

regulasi, penganggaran, dan perencanaan pembinaan yang belum dilaksanakan secara matang," terangnya.

Kemudian untuk dana JKN, lemahnya pengelolaan manajemen SDM, alat kesehatan tidak dijaga kualitasnya serta kurangnya dukungan SOP untuk melaksanakan perencanaan yang memadai.

"Dalam hal pelaksanaan dana pendidikan, masih ditemukan kurangnya pengelolaan data penerima, dan tidak tepat sasaran penggunaannya dana BOS dan PIP," sebutnya.

Adapun posisi TLRHP selesai (Status I dan IV) sampai dengan semester II 2018 di wilayah BPK Kalbar terdapat 15 entitas. Seperti di Pemprov Kalbar, Pontianak, Kabupaten Mempawah, Singkawang, Ketapang, Bengkayang, Sambas, Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi, Landak, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Kapuas Hulu. Dari 15 entitas ini, yang berada diperingkat pertama ada di Kabupaten Landak sebesar 95,57 persen. Paling rendah ada di Melawi sebesar 58,54 persen. "Sedangkan untuk Pemprov Kalbar telah menyelesaikan hingga 88,28 persen," jelasnya.

Dari persoalan yang ada, BPK merekomendasikan pembenahan dalam pembuatan regulasi dan pedoman, tata organisasi, optimalisasi anggaran, perencanaan SDM yang memadai, serta monitoring dan pen-gevaluasian yang lebih baik.



SAMBUTAN. Joko Agus Setyono memberikan sambutan penyerahan laporan hasil dan pemantauan TLRHP kerugian daerah/daerah semester II 2018 di aula BPK kalbar, Selasa (18/12). **Nova Sari-RK**

"Kita juga berharap dari TLRHP yang di bawah 80 persen, serta diharapkan komitmen dari kepala daerah, lembaga perwakilan seperti DPRD dan Inspektorat dalam upaya untuk lebih meningkatkan kembali hasil yang diperoleh," lugasnya

Dalam hal pemantauan tindak lanjut, pada semester II tahun 2018, atas 4.364 temuan pemeriksaan senilai Rp988.042.661.756 telah dihasilkan 10.021 rekomendasi senilai Rp521.260.566.191. Tindak lanjut pemerintah daerah yang telah Sesuai

dengan rekomendasi adalah 7.967 temuan (79,50%) dan sebanyak 63 temuan (0,63%) tidak dapat ditindaklanjuti. "Sementara untuk nilai aset yang telah dikembalikan adalah Rp245.357.674.240," pungkas Joko. **(nov/zai)**